

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan satu dari beragam informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan. Pengguna tersebut terutama diluar perusahaan, yaitu investor dan kreditor. Investor berkepentingan terhadap pelaporan keuangan terkait dengan jumlah investasi atau modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Melalui analisis atas laporan keuangan, investor dapat mengetahui dan meyakini tingkat keamanan investasinya sekaligus dividen yang diharapkan. Sedangkan kreditor, berkepentingan untuk laporan keuangan dalam kaitannya dengan jumlah pokok pinjaman dan bunga yang akan diterima. Melalui laporan keuangan, kreditor dapat mengetahui dan memprediksi kestabilan pengembalian angsuran dan penerimaan dimasa yang akan datang [1].

Agar tujuan penyusunan laporan dapat tercapai, yaitu dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Beberapa lembaga diantaranya ialah IASB, telah menyusun kriteria yang dikenal dengan karakteristik kualitas informasi keuangan. Karakteristik informasi keuangan yang disusun oleh IASB meliputi relevansi, penyajian judul, dapat dibandingkan, ketepatan waktu, dapat diverifikasi dan dapat dipahami [1]. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sejak tanggal tutup buku perusahaan pada 31 Desember sampai tanggal penyerahan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih baik dari pada yang tidak tepat waktu. Penyajian laporan keuangan dianggap tepat waktu apabila dapat disediakan pada saat dibutuhkan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan harus tersedia sebelum kehilangan manfaatnya, yaitu mampu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan [1].

Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena hal tersebut dapat menilai suatu perusahaan, informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberi pengaruh apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi publik dan pihak luar dari perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, setiap perusahaan di bagian keuangan yang memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan, oleh karena itu bagian keuangan harus berfungsi secara baik di dalam suatu perusahaan tersebut. Sehingga

pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus di analisis secara mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang investor atau pihak luar perusahaan lainnya yang ingin membeli atau menjual saham dapat terbantu dengan memahami dan menganalisis laporan keuangan. Sehingga dapat menilai perusahaan mana yang mempunyai prospek yang menguntungkan dimasa depan [24].

Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada empat karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami
- b. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan
- c. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya
- d. Informasinya harus memiliki sifat daya banding

Empat karakteristik tersebut dapat mempengaruhi laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang baik kepada pihak luar perusahaan, dan memudahkan perusahaan untuk mempublikasikan laporannya agar dapat lebih tepat waktu. Seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan pada kenyataannya selalu saja terdapat kelemahan yang dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, bagi pihak pengguna laporan keuangan harus memahami dan menyadari dengan benar setiap keterbatasan tersebut sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun dalam kenyataannya setiap akuntan selalu berusaha memberikan informasi yang maksimal, termasuk menempatkan catatan kaki (*footnotes*) sebagai pendukung informasi [24].

Setiap perusahaan wajib membuat dan melaporkan laporan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi suatu perusahaan. Kemudian laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh setiap perusahaan. Keadaan keuangan perusahaan menggambarkan pos-pos keuangan dalam suatu periode yaitu [1] :

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)

- b. Laporan laba/rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Komponen laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga dengan membaca keseluruhannya, pengguna diharapkan akan memahami secara utuh kondisi keuangan entitas.

Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) yaitu tanggal 31 Maret merupakan perusahaan yang termasuk dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu [2]. Dalam penelitian ini ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan perusahaan dimana untuk laporan keuangan yang disampaikan sebelum atau pada tanggal 31 Maret dinyatakan tepat waktu diberi nilai 1 sedangkan laporan keuangan yang disampaikan setelah tanggal 31 Maret dinyatakan tidak tepat waktu diberi nilai 0.

1.1.2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat dibagi menjadi beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau asset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak [15].

Rasio profitabilitas ditunjukkan juga bagi pihak luar perusahaan, dan tidak hanya pemilik usaha atau pihak manajemen saja. Adapun tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan serta pihak luar perusahaan yaitu [6] :

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan selama periode tertentu.
- b. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.
- c. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- d. Untuk menilai laba posisi setiap perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Profitabilitas yang diproksikan dengan rasio *Return On Asset* (ROA) memberikan gambaran kepada perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang dihasilkan dari kontribusi total aset. *Return On Asset* juga akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan di masa lalu agar bisa dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Peningkatan *Return On Asset* dari satu periode ke periode lainnya menggambarkan bahwa *marger* perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan sangat baik. Rasio profitabilitas yang lebih baik juga digambarkan dari kesuksesan perusahaan dalam meningkatkan penilaian perusahaan. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan semakin terjamin [6].

Rasio profitabilitas yang digunakan dan disesuaikan dengan tujuan kebutuhan perusahaan. Salah satunya adalah *Return On asset* (ROA) (Hasil Pengembalian atas Asset). *Return On Aset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset. Semakin tinggi hasil pengembalian total asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah atas pengembalian atas total asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ROA [15].

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \quad (2.1) .$$

1.1.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya atau usaha dari perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu Perusahaan Besar (*Large Firm*) , Perusahaan Menengah (*Medium Firm*), Perusahaan Kecil (*Small Firm*) [15].

Menurut ketentuan UU No. 20 tahun 2008 Perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu [25] :

1. Perusahaan Kecil (*Small Firm*)

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk bangunan usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

2. Perusahaan menengah (*Medium Firm*)

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar (*Big Firm*)

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000.

Perusahaan dengan total aktiva yang besar membuktikan perusahaan tersebut ke dalam tahap dimana arus kas perusahaan dianggap memiliki kinerja yang baik dalam jangka waktu yang lama. Ukuran perusahaan yang besar lebih mudah mendapatkan dana dari pasar modal, dan kinerja perusahaan dapat menjadi sorotan publik dalam menghasilkan laba. Maka dari itu

perusahaan harus selalu berupaya untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu agar kinerja perusahaan selalu terlihat stabil [15].

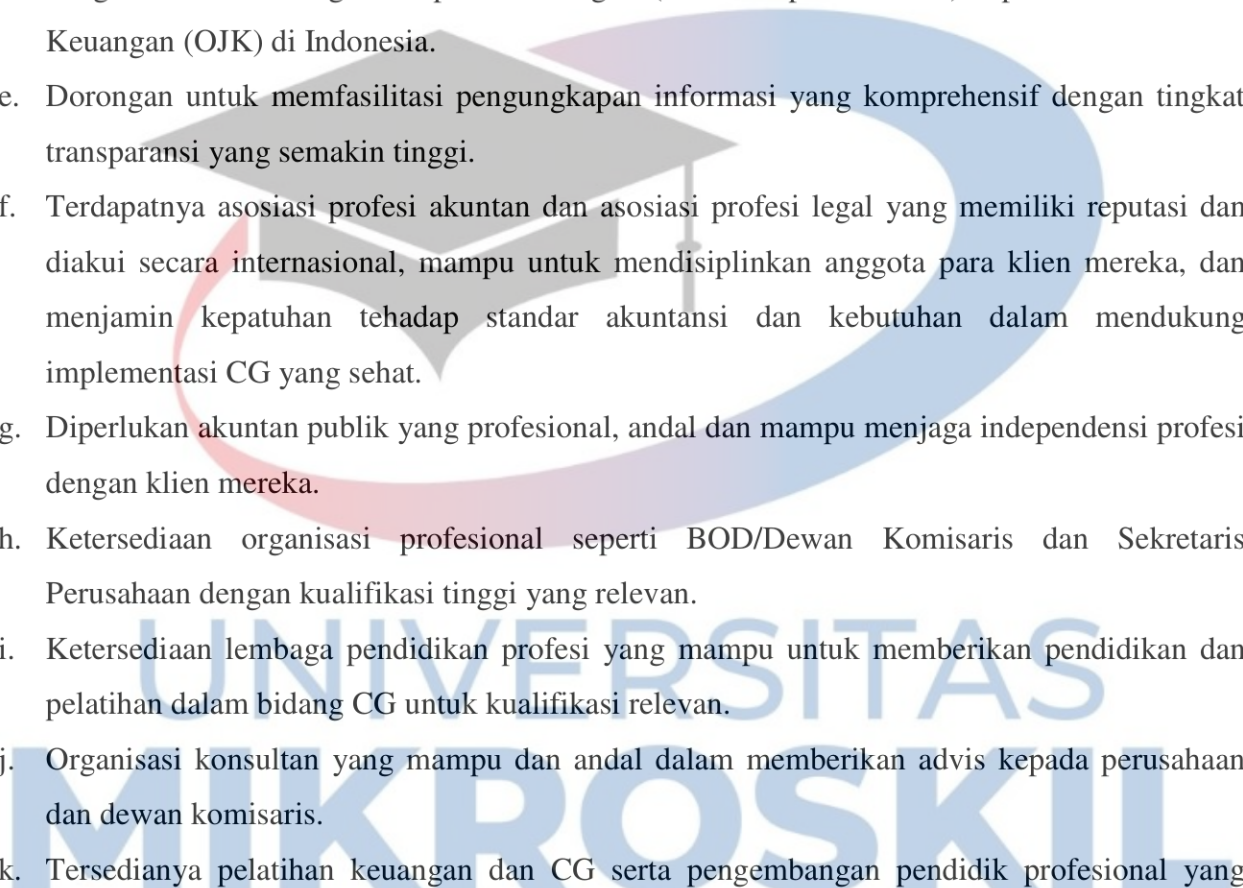
Ukuran Perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat salah satunya dengan total aktiva perusahaan. Kinerja perusahaan yang menjadi perhatian salah satunya adalah kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, agar kinerja perusahaan selalu terlihat stabil maka perusahaan melakukan kebijakan hutang. Hal ini dilakukan agar laba perusahaan tetap stabil dari satu periode ke periode lainnya. Secara umum proksi ukuran perusahaan yang dipakai yaitu logaritma natural asset. Logaritma natural adalah logaritma dengan menggunakan basis bilang e, yaitu bilangan nyata dengan bilangan decimal tak terbatas. Ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total asset dengan tujuan untuk mengurangi frugtasi dana yang berlebihan. Dengan menggunakan logaritma natural, jumlah asset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi jumlah asset yang sesungguhnya. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Ukuran Perusahaan [15]

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln}(\text{total asset}) \quad (2.2)$$

1.1.4. Struktur Kepemilikan yang diukur dengan Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yaitu perusahaan asuransi, perusahaan reksadana, perusahaan investasi, perusahaan leasing maupun perusahaan swasta. Kepemilikan institusional dapat mengurangi pengaruh dari kepentingan-kepentingan lain dalam perusahaan, yaitu seperti kepemilikan saham dan manajer. Kinerja dari manajer dilakukan pengawasan, karena kepemilikan institusional lebih meningkatkan pengawasan. Hal tersebut dilakukan agar pihak luar atau pemegang saham perusahaan dapat menilai hasil kinerja manajer disuatu perusahaan, bila para pemegang saham tidak puas dengan hasil kinerja manajer tersebut, maka para pemegang saham dapat menjual saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang tinggi akan membuat manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan [26].

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi berbagai *institusional arrangements* yang diperoleh dalam mendukung kesuksesan implementasi *governance* :

- 
- a. Diperlukan sistem hukum yang andal termasuk sistem pengendalian yang independen dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pertimbangan yang sehat dan dapat ditegakkan, serta bebas dari intervensi pemerintah dan politik.
 - b. Dibutuhkan pasar modal yang *likuid*, memenuhi standard dan kualifikasi internasional serta mendorong munculnya investor institusi.
 - c. Ketersediaan lembaga keuangan yang andal, termasuk *stock brokers*, dukungan terhadap proses penambahan saham baru dan *financial advisers*.
 - d. Penguatan otoritas regulator pasar keuangan (terutama pasar modal) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.
 - e. Dorongan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi yang komprehensif dengan tingkat transparansi yang semakin tinggi.
 - f. Terdapatnya asosiasi profesi akuntan dan asosiasi profesi legal yang memiliki reputasi dan diakui secara internasional, mampu untuk mendisiplinkan anggota para klien mereka, dan menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebutuhan dalam mendukung implementasi CG yang sehat.
 - g. Diperlukan akuntan publik yang profesional, andal dan mampu menjaga independensi profesi dengan klien mereka.
 - h. Ketersediaan organisasi profesional seperti BOD/Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan dengan kualifikasi tinggi yang relevan.
 - i. Ketersediaan lembaga pendidikan profesi yang mampu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang CG untuk kualifikasi relevan.
 - j. Organisasi konsultan yang mampu dan andal dalam memberikan advis kepada perusahaan dan dewan komisaris.
 - k. Tersedianya pelatihan keuangan dan CG serta pengembangan pendidik profesional yang berkelanjutan.
 - l. Ketersediaan hasil riset dan publikasi hasil riset terkait isu CG, baik berupa implikasi kebijakan CG maupun hasil penelitian empirik yang dapat diterapkan.

Struktur kepemilikan institusional yang tinggi di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan agar lebih optimal terhadap kinerja dari manajemen. Karena para pemegang saham memiliki kekuasaan terhadap kinerja dari manajer. Dengan begitu para investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang

diambil oleh manajer sehingga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya struktur kepemilikan Institusional, maka perusahaan dapat mengoptimalkan untuk megoptimalkan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu [27].

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut [27] :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.3)$$

1.1.5. Komite Audit

Komite audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang optimal dan dewan akan membantu mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, komite audit memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan GCG (*Good Corporate Governance*). Komite audit merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan, dan keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG [19].

Komite audit juga merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keanggotaan komite audit paling kurang terdiri atas tiga orang antara lain komisaris independen dan pihak independen yang berasal dari luar perusahaan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang merangkap juga sebagai anggota [28].

Tugas Komite audit mencakup [28] :

- a. Meningkatkan disiplin korporate dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
- b. Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan.
- c. Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan obyektifitas dari auditor eksternal.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa [29]:

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
 - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
 - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
 - c. Tugas komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.
2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah :
 - a. Pelaporan keuangan
Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit eksternal, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
 - b. Manajemen risiko dan kontrol
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.
 - c. Tata kelola perusahaan
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Dengan demikian fungsi komite audit sudah semakin penting dan sangat menentukan terutama kalau dilihat didalam pedoman GCG (*Good Corporate Governance*), dimana komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum struktur pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik [29].

Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terbaik dengan proses dan peran audit bagi perusahaan untuk publik. Komite audit yang efektif diatur dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Secara matematis, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [29]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.4)$$

1.1.6. Penghindaran Pajak

Pajak adalah iuran kas kepada Negara berdasarkan peraturan perpajakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar. Bagi perusahaan pajak adalah bebanyang harus dibayar sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Karena hal itu, perusahaan sering melakukan *tax avoidance* untuk menekan atau meminimalkan beban pajak seminimal mungkin [30].

Walaupun penghindaran pajak dianggap legal dan tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud dan tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh. Oleh karena itu, yang dipentingkan adalah semangat dari pada setiap tindakan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang [21].

Penghindran pajak merupakan bagian dalam *tax planning*. Dalam *tax planning* ada tiga cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yaitu [31]:

1. *Tax Avoidance*, adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknis yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak), adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikarenakan sanksi pelanggaran hukum tindak pidana fiskal atau kriminal.
3. *Tax Saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli

produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilan menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Cash Effective Tax Rate (CETR) memberikan gambaran aktivitas dari penghindaran pajak yang dapat mengurangi pajak perusahaan kepada otoritas perpajakan CETR juga dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak yang dibagi dengan laba sebelum pajak, yaitu berarti semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diproksikan dengan Rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Rate* (CETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari pembagian beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. CETR menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayar. CETR dipilih sebagai proksi penghindaran pajak karena pengidentifikasi perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Penghindaran Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut [32].

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (2.5)$$

1.1.7. Opini Audit

Opini audit adalah pendapat akuntan publik atau auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diauditnya. Auditor sebagai pihak yang independen didalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan publik yang memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Opini audit merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Karena opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU).

Adapun terdapat beberapa jenis opini auditor, yaitu [23] :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak batasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berita umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsisten dalam menerapkan

prinsip-prinsip akuntansi. Dalam Standar Audit (SA) 411 paragraf empat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang didasarkan atas pertimbangan apakah [23] :

- a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum di Indonesia.
 - b. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan.
 - c. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi yang cukup dan dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci atau tidak terlalu ringkas.
 - d. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasari dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang layak dan praktis untuk mencapai dalam laporan keuangan .
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*).

Apabila audit telah diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan akan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi dalam kondisi tertentu memerlukan sebuah penjelas. Dalam SPAP Seksi 508 paragraf 11 menjelaskan kondisi yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan, antara lain [23]:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakni tentang adanya kesanksian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu memadai.
- d. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan maerial dalam pennggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.

- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartal tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Papepam) namun tidak disajikan atau tidak direview.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapo prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konisten dengan informasi yang disajikan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Menyatakan laporan keuangan audit, menyajikan laporan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang berdampak dengan dikecualikan. Sesuai dengan SA 508 paragraf 20 dijelaskan bahwa pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila [23] :

- a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup adanya batasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Laporan keuangan auditan tidak menyajikan laporan keuangan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya mengenai [23]:

- a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan (SA 508 paragraf 59).

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Pernyataan ini dapat diberikan auditor jika auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Biasanya pernyataan tidak memberikan pendapat ini dikeluarkan oleh auditor apabila terdapat pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu [23].

Opini audit diukur berdasarkan dengan opini yang diperoleh para laporan keuangan perusahaan dimana untuk laporan keuangan yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian mendapatkan *good news* diberi nilai 1 dan laporan keuangan selain wajar tanpa pengecualian mendapatkan *bad news* diberi nilai 0.

1.2. Review Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang *go public* cukup banyak menarik perhatian para penelitian untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Dengan adanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar pada penelitian ini. Berikut ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan :

1. Fadhil Azhari dan Muhammad Nuryatno melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Peran Opini Audit sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7].
2. Komang Wahyu Surya Saputra dan Wayan Ramantha melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [11].

3. Mega Arita Dewayani, Moh. Al amin dan Veni Soraya Dewi melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* dan reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, likuiditas, dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [12].
4. Sri Evliani melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Faktor-Faktor Berpengaruh Bagi Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel *debt to equity ratio* dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [8].
5. Sri Ayem, Bernadetha R. Rado melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyampaian Laporan keuangan (Studi pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2017)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [16].
6. Ni Luh Gede Witasari, I Gede Cahyadi Putra dan Ida Ayu Ratih Mauari melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada periode 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan, sedangkan variabel likuiditas, *leverage*, rasio aktivitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan [9].

7. Rina Kusumawardani dan Naswar Patuh Priyadi melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Profitabilitas sebagai Moderasi”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [17].
8. Dewi Utami dan Yennisa melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Bank di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada periode 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel profitabilitas, *leverage*, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [13].
9. Dwi Nanda Dewi Fortuna dan Yenni Khriyana melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [10].
10. Anita Fitri Lumbantoruan dan Septony B. Siahaan melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi KAP, dan Kepemilikan Manajerial”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi KAP, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [14].
11. Ni Luh Meina Mulianingsih dan I Made Sukartha melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hasil Penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap waktu publikasi laporan keuangan [22].

12. Khomsin Fajar Kurniawan dan Siti Mutmainah melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Karakteristik Komite audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Independensi dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Frekuensi rapat komite audit, keahlian Otoritas dan Gender Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan [20].



Table 1.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Fadhil Azhari dan Muhammad Nuryatno (2020) [7]	Peran Opini Audit sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Kepemilikan Institusional d. Komite Audit	a. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Kepemilikan Institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Komang Wahyu Surya Saputra dan Wayan Ramantha (2017) [11]	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Pemoderasi	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan	a. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Mega Arita Dewayani Moh Al Amin dan Veni Soraya Dewi (2017) [12]	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Struktur Kepemilikan c. Profitabilitas d. Likuiditas e. Penghindaran Pajak f. <i>Leverage</i> g. Reputasi KAP	a. <i>Leverage</i> dan Reputasi KAP berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan b. Ukuran perusahaan, Struktur kepemilikan, Profitabilitas, Likuiditas dan Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Sri Elviani (2017) [8]	Faktor-Faktor Berpengaruh	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan waktu pelaporan keuangan <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Debt to Equity Ration</i> (DER) b. Profitabilitas c. Struktur Kepemilikan d. Kualitas auditor	a. Profitabilitas dan Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. <i>Debt to Equity Ratio</i> dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
Sri Ayem Bernadetha F. Rado (2019) [16]	Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan LQ45	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan :	a. Likuiditas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. b. Penghindaran pajak tidak

Lanjutan Tabel 2.1.

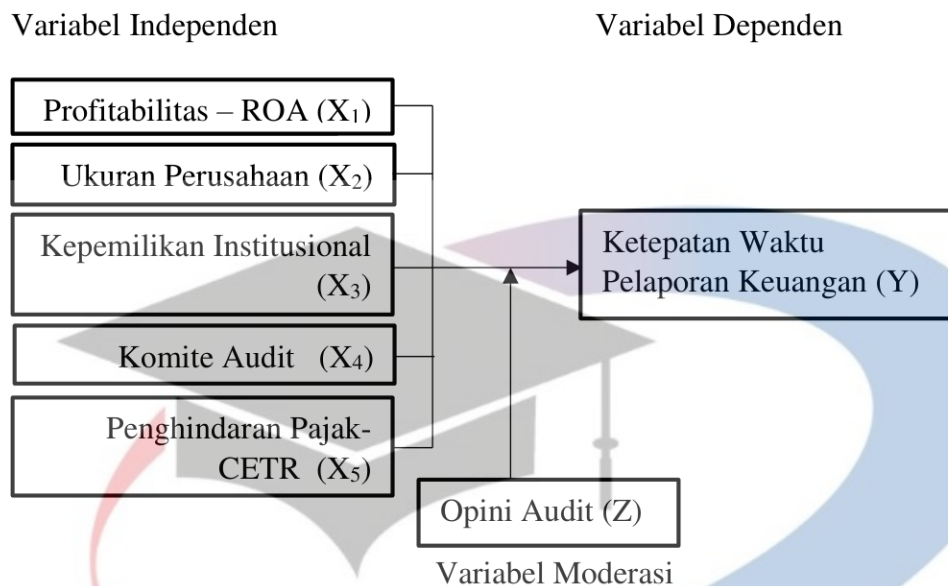
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
	yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)	<u>Variabel Independen :</u> a. Likuiditas b. Penghindaran Pajak c. Ukuran Perusahaan	berpengaruh terhadap ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
Ni Luh Gede Witasari I Gede Putra dan Ida Ayu Ratuh Manuari (2021) [9]	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. Likuiditas c. <i>Leverage</i> d. Rasio Aktivitas e. Ukuran Perusahaan f. Umur Perusahaan	a. Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. b. Likuiditas, <i>Leverage</i> , Rasio Aktivitas, Ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
Rina Kusumawardani dan Maswar Paruh (2018) [17]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. <i>Leverage</i>	a. Ukuran perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan b. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Dewi Utami dan Yennisa (2017) [13]	Faktor-Faktor mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Subsektor Bank di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan <u>Variabel Independen :</u> a. Ukuran perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i>	a. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan b. Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Dwinanda Dewi Fortuna dan Yenni Khristiana (2021) [10]	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan <i>Leverage</i> terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Likuiditas d. <i>Leverage</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Anita Fitri Lumbantoruan dan Septony B. Siahaan (2018) [14]	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP dan Kepemilikan	<u>Variabel Dependen :</u> Ketepatan waktu pelaporan keuangan <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas	Profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

Lanjutan tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
	Manajerial	b.Likuiditas c.Ukuran Perusahaan d.Umur Perusahaan e.Reputasi KAP f.Kepemilikan Manajerial	
Ni Luh Meina Mulianingsih dan I Made Sukartha (2018) [22]	Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi	<u>Variabel Dependen:</u> Waktu Publikasi Laporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> a. Penghindaran Pajak	Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap waktu publikasi laporan keuangan
Khomsin Fajar Kurniawan dan siti Mutmainah (2020) [20]	Pengaruh Karakteristik Komkte audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> a. Independensi Komite Audit b. Keahlian Komite Audit c. Ukuran Komite audit d. Frekuensi Rapat Komite audit e. Otoritas Komite audit f. Gender Komite audit	a. Independensi dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan b. Frekuensi rapat komite audit, keahlian Otoritas dan Gender Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

1.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model atau bentuk konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berkaitan dengan berbagai factor-faktor yang telah peneliti uraikan sebagai masalah penting. Kerangka konseptual yang dibuat dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan konseptual diatas Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan. Variabel Independen pada penelitian ini adalah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Komite Audit dan Penghindaran Pajak, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Opini audit.

1.4. Pengembangan Hipotesis

1.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi merupakan berita bagus bagi perusahaan karena perusahaan cenderung akan lebih tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya. Profitabilitas juga dapat membantu berjalan atau tidak suatu perusahaan tersebut. Perusahaan juga akan terus berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya agar tercapainya tujuan atau keberhasilan dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan peneliti teradhulu yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7] [8] [9] [10]. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

1.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan lebih mudah memperoleh sumber daya dan teknologi yang canggih dan lebih mudah memperoleh sistem pengendalian internal yang kuat dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan berinvestasi. , sehingga cepat dalam penyelesaian laporan keuangan dan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan [7] [11] [16] [17] [13] [10]. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah.

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

1.4.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan yang diukur dengan Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Struktur Kepemilikan Institusional sebagai principal mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa maupun kritikan atau komentar yang dianggap opini public atau masyarakat sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan dengan sekehendak hati menjadi perusahaan yang berjalan dengan pemantauan. Oleh karena itu, pihak manajemen sebagai agen dituntut untuk melakukan kinerja dengan baik dalam menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan akan berpengaruh pada pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan [8]. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian in adalah.

H₃ : Struktur Kepemilikan diukur dengan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan

1.4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite Audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris yang memiliki fungsi dan peran audit bagi perusahaan untuk publik. Komite Audit yang efektif diatur dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan demikian, fungsi dan peran Komite Audit juga berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan yaitu dengan memeriksa informasi keuangan perusahaan yang akan dikeluarkan. Jika tugas dan tanggung jawab Komite Audit sudah terpenuhi, maka berkurangnya jumlah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara tidak tepat waktu. Tetapi dengan banyaknya anggota komite audit tidak berpengaruh dan kurang mendorong perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan [7]. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah.

H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

1.4.5. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Penghindaran Pajak menjadi salah satu strategi perusahaan untuk meminimalkan dan meringankan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara dengan tidak melakukan pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jika perusahaan melakukan pelanggaran akan mengakibatkan masalah, seperti mendapat tuduhan memanipulasi laporan keuangan. Apabila suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat mengakibatkan waktu pelaporan keuangan menjadi tidak tepat waktu karena perusahaan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melaporkan laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan [22]. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah

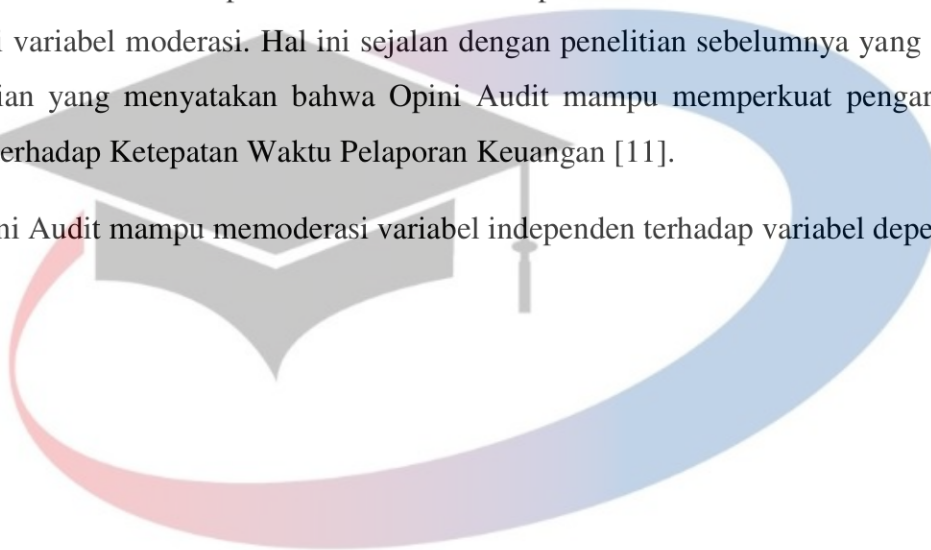
H₅ : Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

1.4.6. Opini audit Memoderasi Hubungan antara Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Penghindaran Pajak terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Opini audit sebagai variabel moderasi berfungsi menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel Independen terhadap Variabel Dependen. Laporan keuangan yang mendapat

opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan *good news* dari auditor sehingga auditor tidak perlu melakukan prosedur tambahan dalam proses auditnya. Sebaliknya perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain *unqualified opinion* karena hal tersebut dianggap sebagai berita buruk (*bad news*). Semakin tinggi variabel Independen dan Variabel Dependen, maka semakin tinggi pula opini audit sebagai variabel moderasinya. Begitu juga sebaliknya jika semakin rendah variabel independen dan variabel dependen maka semakin rendah pula opini audit sebagai variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa Opini Audit mampu memperkuat pengaruh variabel Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan [11].

H₆ : Opini Audit mampu memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen



UNIVERSITAS
MIKROSKIL